

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



PEMERINTAH KOTA DUMAI

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2024**

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAH, segala puji hanya bagi ALLAH SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 dapat disusun dengan baik dan selesai tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 ini disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Dokumen Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen Renja ini, terutama kepada seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kota Dumai yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh tahapan penyusunan dokumen ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Dumai, 26 Juli 2024

INSPEKTUR DAERAH,



Drs. RIKI DWI WORO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730929 199303 1 003

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI NOMOR

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR TABEL

iii

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang 1
- 1.2 Landasan Hukum 3
- 1.3 Maksud dan Tujuan 6
- 1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s.d. TW II Tahun 2024 9
- 2.2 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 19
- 2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 29

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 31

BAB IV PENUTUP 36

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
Tabel 3.1	Rumusan Perubahan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	32



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BABI
BAB I

PENDAHULUAN

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun berjalan pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mempedomani Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L, dan Renja Provinsi. Adapun proses/tata cara penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah:

Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja setelah menerima Surat Edaran Wali kota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan ini berpedoman pada:

- a. Rancangan perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

Penyusunan rancangan perubahan Renja terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, mencakup:
 - analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan TW II tahun berkenaan; dan
 - penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan perubahan Renja, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan TW II tahun berkenaan;

- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. penutup.

Rancangan Perubahan Renja ini disampaikan kepada Wali kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Surat Edaran Wali kota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah diterima.

2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah:

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir berdasarkan Peraturan Wali kota tentang Perubahan RKPD. Penyusunan rancangan akhir ini diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Wali kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Rancangan akhir perubahan Renja ini disampaikan kepada Wali kota melalui Bappeda untuk diverifikasi. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Wali kota tentang Perubahan RKPD. Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi dari Bappeda dan menyampaikannya kembali ke Bappeda. Verifikasi rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Wali kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

3. Penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah:

Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali kota ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 disusun setelah Inspektorat Daerah menerima surat Wali Kota Nomor 000.7.2/157/BAPPEDA tanggal 29 Mei 2024 tentang Penyampaian

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2024. Rancangan Perubahan Renja ini disampaikan kepada Wali Kota melalui Bappeda untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi, rancangan Perubahan Renja Inspektorat Daerah selanjutnya disusun menjadi rancangan akhir berdasarkan Peraturan Wali kota tentang Perubahan RKPD. Rancangan akhir perubahan Renja kemudian disampaikan kepada Wali Kota melalui Bappeda untuk diverifikasi. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Inspektorat Daerah telah selaras dengan Peraturan Wali kota tentang Perubahan RKPD. Setelah dilakukan penyempurnaan rancangan akhir perubahan Renja berdasarkan saran dan rekomendasi dari Bappeda, penyempurnaan rancangan akhir Renja tersebut disampaikan kembali ke Bappeda untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perubahan Renja Perangkat Daerah melalui Keputusan Wali kota. Perubahan Renja yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali kota ini akan menjadi pedoman dalam menyusun perubahan RKA Inspektorat Daerah Tahun 2024

Dokumen perubahan Renja Tahun 2024 ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum perumusan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
18. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 110 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 61 Seri E);

19. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen perubahan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 yang akan dijadikan sebagai pedoman oleh Inspektur Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024. Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Perubahan Renja Inspektorat Daerah ini telah disusun selaras dengan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024. Penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap dokumen Perubahan Renja Inspektorat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja, proses penyusunan Perubahan Renja, serta keterkaitan antara rancangan Perubahan Renja Inspektorat Daerah dengan rancangan akhir dokumen perubahan RKPD Kota Dumai tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Inspektorat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s.d. TW II Tahun 2024.

Bagian ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 sampai dengan TW II. Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain:

- a. realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- f. kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah.

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Dumai berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan pada dokumen Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

2.3. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Bagian ini berisikan uraian mengenai:

- a. sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- b. permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
- c. dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan terhadap capaian program nasional;
- d. tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan; dan
- e. formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini melampirkan perubahan rencana kerja dan pendanaan Inspektorat Daerah yang disesuaikan dengan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Dumai Tahun 2024. Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi jumlah program/kegiatan, sifat penyebaran lokasi program/kegiatan, serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN IKU

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s.d. TW II Tahun 2024

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan suatu upaya pemantauan/supervisi yang dilakukan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi suatu program/kegiatan dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah program/kegiatan dilaksanakan. Berdasarkan analisis-
analisis yang dilakukan pada saat evaluasi, selanjutnya akan ditentukan alternative solusi yang harus dilakukan agar target-target yang telah ditetapkan pada setiap program/kegiatan dapat tercapai pada akhir tahun rencana.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai dilakukan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah maupun RPJMD Kota Dumai. Sedangkan evaluasi terhadap Renja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan TW II dilakukan untuk memastikan agar target-target program/kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2026. Jika sampai dengan TW II ditemukan program/kegiatan/subkegiatan yang target-targetnya tidak mungkin terealisasi sampai dengan akhir tahun rencana, maka akan ditentukan alternative solusi yang harus dilakukan agar target-target yang telah ditetapkan tetap dapat tercapai di akhir tahun rencana. Pada Tabel 2.1

berikut terlampir hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Inspektori Daerah Kota Dumai

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/KEWILAYAHAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)/KEGIATAN/KEWILAYAHAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN AKHIR PERIODE RENJRA (s.d. TAHUN 2024)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024		REALISASI KINERJA S.D. TRIMULAN II TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJRA S.D. TAHUN 2024	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
6	UNSUBSIDIANSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3												
6 01	INSPEKTORAT DAERAH													
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		108.825.399,873	100%	28.027.587,787	24.398.360,182	8.065.115,778	28.027.587,787	24.398.360,182	100%	16.632.835,640	16.632.835,640		
6 01 01 201	KEPADA BANTUAN PERANGKAT DAERAH		82.077.917,891	40%	23.386.756,467	20.110.008,670	6.827.731,861	23.386.756,467	20.110.008,670	100%	14.132.686,040	14.132.686,040		
6 01 01 201	Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.825.825,700	100%	145.158,700	440.000,000	60.326,300	145.158,700	440.000,000	100%	109.060,596	109.060,596	14%	255.719,296
6 01 01 201 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan		150.000,000	26 Dokumen		8 Dokumen			8 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	15%	
6 01 01 201 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah		150.000,000	7 Dokumen		2 Dokumen			2 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	
6 01 01 201 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RAK-SKPD dan RAK-SKPD		150.000,000	3 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	
6 01 01 201 0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RAK-SKPD dan RAK-SKPD		150.000,000	3 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	
6 01 01 201 0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RAK-SKPD dan RAK-SKPD		150.000,000	3 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen	0%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	
6 01 01 201 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Malar Realisasi Kinerja SKPD		161.115,000	1 Dokumen	11.115,000	1 Laporan		11.115,000	1 Laporan	100%	0 Dokumen	0 Dokumen	7%	11.115,000
6 01 01 201 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		914.711,700	1 Dokumen	135.043,700	1 Laporan		135.043,700	1 Laporan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	27%	244.104,296
6 01 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		54.888.434,200	14 Orng/Bulan	18.392.877,877	2 Laporan		18.392.877,877	15.125.040,670	100%	1 Laporan	1 Laporan	55%	30.425.713,517
6 01 01 202 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		54.448.434,200	14 Bulan	18.392.877,877	53 Orng/Bulan		18.392.877,877	15.095.040,670	100%	67 Orng/Bulan	14 Bulan	56%	30.425.713,517
6 01 01 202 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		200.000,000	0 Laporan		1 Laporan			35.000,000	0%	0 Laporan	0 Laporan	0%	
6 01 01 203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.829.781,050	1 Laporan	354.309,250	1 Laporan		354.309,250	300.000,000	100%	1 Laporan	1 Laporan	28%	519.836,450
6 01 01 203 0001	Penyusunan Penyusunan Kelembagaan Barang Milik Daerah SKPD		75.000,000	3 Laporan		0 Laporan			0 Laporan	0%	0 Laporan	0 Laporan	25%	
6 01 01 203 0006	Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD		1.754.781,050	1 Laporan	354.309,250	1 Laporan		354.309,250	300.000,000	100%	1 Laporan	1 Laporan	30%	519.836,450

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ INSUBKEGI/ ATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENJRA (s.d. TAHUN 2024)			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S.D TAHUN 2023			REALISASI KINERJA S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJRA S.D. TAHUN 2024		
		K	Rp.	%	K	Rp.	%	K	Rp.	%	K	Rp.	%	K	Rp.	%
6 01 01 2 05	Administrasi Kependudukan Peringkat Daerah	4 Laporan	2.716.850.000	0 Sbl	245.944.112	0 Sbl	140.857.000	0 Laporan	187.190.524	0 Sbl	433.138.636	16%	1 Laporan	-	25%	
6 01 01 2 05 0001	Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas dan Sarana	233 Orang	1.816.850.000	36 Orang	245.944.112	36 Orang	140.857.000	25 Orang	187.190.524	30%	433.138.636	24%	35 Orang	-	30%	
6 01 01 2 05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang	500.000.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0%	-	0%	0 Orang	-	0%	
6 01 01 2 05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang	400.000.000	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0%	-	0%	0 Orang	-	0%	
6 01 01 2 06	Administrasi Umum Peringkat Daerah	12 Bulan	6.692.527.988	12 Bulan	1.337.612.866	12 Bulan	188.216.495	1 Laporan	644.286.700	100%	1.881.899.566	30%	1 Laporan	-	100%	
6 01 01 2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	233.899.685	12 Bulan	33.898.500	12 Bulan	5.972.800	1 Paket	13.901.500	100%	47.800.000	20%	2 Paket	-	75%	
6 01 01 2 06 0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	1.265.698.798	12 Bulan	215.798.050	12 Bulan	24.939.795	1 Paket	118.247.600	100%	333.983.650	26%	1 Paket	-	33%	
6 01 01 2 06 0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	8 Paket	562.830.000	2 Paket	17.692.000	2 Paket	5.486.900	2 Paket	22.807.100	50%	40.499.100	7%	2 Paket	-	50%	
6 01 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	800.310.655	12 Bulan	216.486.721	12 Bulan	24.142.000	0,50 Paket	97.592.000	100%	314.078.721	39%	2 Paket	-	38%	
6 01 01 2 06 0005	Penyediaan barang bekalan dan perlengkapan	12 Bulan	716.018.620	12 Bulan	130.217.200	12 Bulan	7.181.000	180.000.000	89.994.500	100%	220.211.000	31%	2 Paket	-	100%	
6 01 01 2 06 0006	Penyediaan bahan busana dan peralatan pendukung urusan	8 Paket	159.838.000	12 Bulan	9.938.000	2 Paket	1.216.000	8.000.000	4.988.000	100%	14.926.000	9%	1 Paket	-	50%	
6 01 01 2 06 0009	Penyediaan Rakit Koordinat dan Konsilias SPPD	72 Orang/Kel	2.933.834.000	36 Laporan	713.644.395	13 Paket	99.866.000	600.000.000	296.756.000	100%	1.010.400.395	34%	40 Laporan	-	40%	
6 01 01 2 06 0010	Penyediaan Asap Dinamis pada SPPD	3 Laporan	300.000.000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 01 01 2 06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SPPD	4 Dokumen	683.200.000	1 Dokumen	90.424.223	0 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Peringkat Usahan Pemerintah Daerah	12 Bulan	6.773.163.357	12 Bulan	1.040.582.089	12 Bulan	-	1.375.208.000	310.708.980	100%	1.351.271.049	20%	27 unit	-	16%	
6 01 01 2 07 0001	Pengadaan Kendaraan Perantara Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	4 unit	725.208.000	1 unit	125.160.000	0 unit	-	125.208.000	-	25%	125.160.000	0%	0 unit	-	0%	
6 01 01 2 07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0 unit	380.000.000	0 unit	-	0 unit	-	-	-	-	-	-	0 unit	-	0%	

KODE	URUSAN/BIJANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE (s.d. TA 2023)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN S.D TAHUN 2023		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJTRA S.D. TAHUN 2024			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	TINGKAT REALISASI (%)	TINGKAT REALISASI (%)
6 01 01 2 07 0005	Pengadaan Mebel	0 unit	998.000.000	0 unit	-	15 unit	200.000.000	28 unit	124.283.592	28 unit	124.283.592	10%	12%
6 01 01 2 07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	145 unit	2.554.191.850	0 unit	549.682.850	40 unit	500.000.000	0 unit	-	40 unit	549.682.850	100%	22%
6 01 01 2 07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19 unit	1.515.763.507	14 unit	365.819.218,51	20 unit	400.000.000	0 unit	-	14 unit	552.244.607	100%	36%
6 01 01 2 07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 unit	400.000.000	1 unit	-	1 unit	150.000.000	0 unit	-	0 unit	-	0%	0%
6 01 01 2 07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	200.000.000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0%	0%
6 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penujangan Usahan Pemertintahan Daerah	12 Bulan	2.397.472.820	12 Bulan	711.417.269	2 Laporan	418.600.000	0,93 Laporan	214.219.239	12 Bulan	452.300.400	100%	49%
6 01 01 2 08 0001	Penyediaan Jasa Survei/penyusunan	0 Bulan	30.000.000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	-	-	-	-	0%	0%
6 01 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Ar dan Listrik	12 Bulan	174.993.300	12 Bulan	44.523.874	1 Laporan	40.000.000	0,44 Laporan	12.133.900	12 Bulan	68.523.874	100%	39%
6 01 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	203 Orang Bulan	2.192.479.520	203 Orang Bulan	666.893.395	1 Laporan	378.600.000	0,44 Laporan	202.085.389	203 Orang Bulan	428.300.400	100%	50%
6 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Usahan Pemertintahan Daerah	463 unit	3.960.861.796	12 Bulan	1.079.446.101	63 unit	493.160.000	22 unit	52.301.940	12 Bulan	230.776.000	100%	33%
6 01 01 2 09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Horongan Dinas atau Kendaraan Dinas Sambilan	7 unit	455.965.960	7 unit	292.924.000	3 unit	33.580.000	0,00 unit	-	7 unit	18.000.000	100%	68%
6 01 01 2 09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 unit	1.081.863.720	0 unit	175.658.000	9 unit	249.600.000	1 unit	31.656.940	0 unit	162.240.000	100%	31%
6 01 01 2 09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	733.097.196	12 Bulan	71.560.000	50 unit	60.000.000	21 unit	20.645.000	12 Bulan	48.538.000	100%	17%
6 01 01 2 09 0007	Pemeliharaan Aet Tetap Lainnya	12 Bulan	26.635.000	12 Bulan	26.635.000	-	-	-	-	12 Bulan	26.635.000	100%	100%
6 01 01 2 09 0008	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1LS	1.463.099.920	1LS	512.669.101	1 unit	150.000.000	0 unit	-	1LS	512.669.101	100%	35%
6 01 01 2 09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	200.000.000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0%	0
6 01 02	PROGRAM PEVELENGARAAN PENGAWASAN	100%	16.792.039.182	4%	3.085.359.410	100%	2.938.351.512	100%	749.925.576	100%	1.465.771.800	100%	27%
6 01 02 2 01	Penyenggaraan Pengawasan Internal	100%	12.795.265.100	183 Laporan	2.647.874.130	93 Laporan	2.220.000.000	71 Laporan	673.150.576	100%	1.321.771.800	100%	31%
6 01 02 2 01 0001	Pengawasan Kinerja Pemertintahan Daerah	58 LHP	3.891.000.000	58 LHP	887.850.000	12 Laporan	100.000.000	5 Laporan	99.900.000	58 LHP	987.750.000	100%	25%
6 01 02 2 01 0002	Pengawasan Keuangan Pemertintahan Daerah	230 Laporan	4.498.200.000	87 Laporan	615.150.000	38 Laporan	1.250.000.000	31 Laporan	283.100.000	147 Laporan	1.223.850.000	64%	27%
6 01 02 2 01 0003	Pengawasan Kinerja Pemertintahan Daerah	11 Dokumen	1.681.428.100	11 Dokumen	380.856.800	11 Dokumen	400.000.000	11 Dokumen	227.484.900	11 Dokumen	679.445.700	100%	40%

KODE	URUSAN/BIROKRASI/PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (OUTPUT) / SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENJRA (s.d. TAHUN 2023)		REALISASI KINERJA S.D. TRIMULAN II TAHUN 2024		PERKIRAAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJRA S.D. TAHUN 2024			
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	TINGKAT REALISASI (%)	TINGKAT REALISASI (%)
6 01 02 2.01 0004	Revisi Laporan Keuangan	287 Laporan	403.668.800	1 Laporan	38.048.676	40 Laporan	39.835.500	128 Laporan	140.918.490	100%	48%
6 01 02 2.01 0007	Monitoring dan Evaluasi Tidak Lajut Hasil Pemantauan BKRI dan Tidak Lajut Hasil Pemantauan APP	4 Laporan	2.320.937.200	1 Laporan	114.517.000	1 Laporan	274.476.400	2 Laporan	937.381.740	100%	50%
6 01 02 2.02	Pengelolaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	80%	662.905.340	2 dokumen	14.517.000	1 dokumen		4 dokumen		50%	
6 01 02 2.02 0001	Pengawasan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	80%	3.965.774.082	119 Laporan	437.785.280	17 Laporan	716.351.512	13 Laporan	144.800.000	85%	100%
6 01 02 2.02 0001	Pengawasan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	119 Laporan	437.785.280	17 Laporan	716.351.512	13 Laporan	716.351.512	13 Laporan	144.800.000	85%	100%
6 01 02 2.02 0002	Pengawasan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	4 LHP	2.167.684.082	4 LHP	261.223.500	16 Laporan	338.351.512	2 Laporan	114.920.000	100%	34%
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PEDAMPINGAN DAN ASISTENSI	100%	9.855.442.800	40%	1.543.471.310	100%	1.250.000.000	100%	1.034.375.800	100%	28%
6 01 03 2.01	Perencanaan Kebijakan Teknik di Bidang Perencanaan dan Fasilitas Pengawasan	8 rekomendasi	2.161.793.400	2 rekomendasi	510.751.200	2 rekomendasi	350.000.000	03 rekomendasi	62.569.100	100%	38%
6 01 03 2.01 0001	Perencanaan Kebijakan Teknik di Bidang Pengawasan	4 rekomendasi	867.397.600	1 rekomendasi	117.161.400	1 rekomendasi	200.000.000	03 rekomendasi	62.569.100	100%	50%
6 01 03 2.01 0002	Perencanaan Kebijakan Teknik di Bidang Fasilitas Pengawasan	4 rekomendasi	1.294.395.800	1 rekomendasi	393.589.800	1 rekomendasi	150.000.000	00 rekomendasi		100%	25%
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	252 perangat daerah	7.793.649.400	15 perangat daerah	1.032.720.710	15 perangat daerah	900.000.000	9 perangat daerah	971.806.700	100%	15%
6 01 03 2.02 0001	Pendampingan dan Asistensi Usaha Perencanaan Daerah	18 perangat daerah	1.688.000.000	3 perangat daerah	30.821.000	3 perangat daerah	100.000.000	3 perangat daerah	200.000.000	100%	72%
6 01 03 2.02 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	121 perangat daerah	1.714.382.000	10 perangat daerah	193.710.310	1 perangat daerah	250.000.000	1 perangat daerah	249.982.000	100%	17%
6 01 03 2.02 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi	3 Dokumen, 12 kegiatan	2.403.862.600	3 Dokumen, 3 kegiatan	549.305.992	1 kegiatan	300.000.000	1 kegiatan	271.824.700	100%	50%
6 01 03 2.02 0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencapaian Kegiatan	3 Dokumen, 2 perangat daerah	1.887.404.800	2 perangat daerah	258.883.408	2 perangat daerah	250.000.000	1 perangat daerah	250.000.000	100%	4%

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pada periodisasi Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja program/kegiatan/subkegiatan sampai dengan TW II tahun 2024, maka dapat dijelaskan beberapa hal terkait dengan:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga periodisasi RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026, artinya sampai dengan tahun 2024 minimal capaian masing-masing target keuangan program/kegiatan/subkegiatan adalah 40%, sedangkan capaian minimal output/outcome pada tahun 2023 adalah sebesar 100% dan tahun 2024 sebesar 25%. Berdasarkan evaluasi realisasi fisik dan keuangan sampai dengan tahun 2024 sebagaimana yang tersaji pada Tabel 2.1 diatas, maka beberapa kegiatan/subkegiatan yang diprediksi tidak mencapai target akhir yang direncanakan pada dokumen perencanaan jangka menengah diantaranya:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

- 1) Subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Subkegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
- 3) Subkegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD;
- 4) Subkegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD; dan
- 5) Subkegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD.
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Meskipun kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tidak didukung oleh anggaran yang memadai, namun output dari setiap subkegiatan tercapai karena dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang wajib disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

- 1) Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD; dan

2) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.

Sama halnya dengan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah , meskipun kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah tidak didukung oleh anggaran yang memadai, namun output dari setiap subkegiatannya tercapai karena dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang wajib disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
Tingkat realisasi keuangan kegiatan ini sampai dengan tahun 2024 tidak terealisasi sesuai target, namun outputnya tercapai. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran pada kegiatan ini.

- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:

1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pembinaan dan pengawasan, salah satunya yaitu pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP. Inspektorat Daerah tetap berkomitmen untuk melaksanakan amanat tersebut pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Hal tersebut akan terealisasi jika ada dukungan anggaran dan komitmen dari TAPD.

- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi keuangan pada masing-masing subkegiatan pada kegiatan ini sampai dengan tahun 2023 tidak

terrealisasi sesuai dengan target, namun outputnya tercapai. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran pada kegiatan ini.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

- 1) Subkegiatan pengadaan mebel;
- 2) Subkegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
- 3) Subkegiatan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;

Secara keseluruhan, tingkat realisasi fisik dan keuangan pada masing-masing subkegiatan pada kegiatan ini sampai dengan tahun 2023 tidak terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan, sementara Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 mengamanatkan Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pembinaan dan pengawasan, salah satunya yaitu sarana dan prasarana pengawasan dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah tetap berkomitmen untuk melaksanakan amanat tersebut pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Hal tersebut akan terealisasi jika ada dukungan anggaran dan komitmen dari TAPD.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi keuangan pada masing-masing subkegiatan pada kegiatan ini sampai dengan tahun 2023 tidak terealisasi sesuai dengan target, namun outputnya tercapai. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran pada kegiatan ini.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tingkat realisasi fisik dan keuangan pada beberapa subkegiatan pada kegiatan ini sampai dengan tahun 2023 tidak terealisasi sesuai dengan target, namun barang milik daerah tersebut masih dapat difungsikan dengan baik. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran pada kegiatan ini.

- i. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
Secara keseluruhan, tingkat realisasi keuangan pada masing-masing subkegiatan pada kegiatan ini sampai dengan tahun 2023 tidak terealisasi sesuai dengan target, namun outputnya tercapai. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran pada kegiatan ini.
 - j. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
Tingkat realisasi fisik dan keuangan pada subkegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu dan subkegiatan penanganan penyelesaian kerugian Negara/daerah sampai dengan tahun 2023 tidak terealisasi sesuai dengan target, oleh karena itu pada penganggaran perubahan subkegiatan ini menjadi salah satu subkegiatan yang diprioritaskan penambahan anggarannya agar outputnya tercapai.
 - k. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
Secara keseluruhan, tingkat realisasi keuangan pada masing-masing subkegiatan pada kegiatan ini sampai dengan tahun 2023 tidak terealisasi sesuai dengan target, namun outputnya tercapai. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran pada kegiatan ini.
 - l. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.
Secara keseluruhan, tingkat realisasi keuangan pada masing-masing subkegiatan pada kegiatan ini sampai dengan tahun 2023 tidak terealisasi sesuai dengan target, namun outputnya tercapai. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran pada kegiatan ini.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
Seperti yang telah dijelaskan pada poin 1 “Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan” diatas, terdapat beberapa subkegiatan yang tingkat realisasi keuangan pada masing-masing subkegiatannya sampai dengan tahun 2023 tidak terealisasi sesuai dengan target, namun outputnya tercapai. Artinya, terjadi efisiensi penggunaan anggaran pada subkegiatan-subkegiatan tersebut.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sampai dengan tahun 2023, tidak ada subkegiatan yang realisasi fisik maupun keuangannya melebihi target yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Ada beberapa faktor yang diprediksi menyebabkan tidak tercapainya target kinerja yang direncanakan, diantaranya terjadinya kesalahan dalam menetapkan target kinerja pada saat penyusunan dokumen Renstra, kurangnya komitmen untuk merealisasikan rencana yang sudah ditetapkan, keterbatasan anggaran, kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur, kurangnya sarana dan prasarana penunjang layanan, dan/atau alasan teknis lainnya.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Ketersediaan SDM dan anggaran yang terbatas sangat mempengaruhi tercapai atau tidaknya target yang telah ditetapkan di dalam dokumen Renstra. Oleh karena itu, ketersediaan data dukung yang valid dan lengkap sangat dibutuhkan untuk menyusun target pada dokumen rencana agar tepat dalam menentukan indikator, baik target maupun pendanaan indikatifnya.

2.2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Inspektorat Daerah Kota Dumai merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Dumai sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.	Level Maturitas SPIP	Level	3					100%		100%			
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Nilai		3,200	3,225	3,250		100%	105%	100%	100%		
2.	Level Kapabilitas APIP	Level	3					100%					
	Skor Kapabilitas APIP	Skor		3,31	3,35	3,35		100%	100%	100%	100%		
3.	Nilai SAKIP OPD	Nilai	BB					100%					
	Rata-rata Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Predikat		72	73	74			93%	95%	100%		
4.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan BPK - RI	%	86	86	86,3	86,6		100%	97%	98%	100%		
5.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan APIP	%	86	87	87,3	87,6		100%	98%	99%	118%		

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a) Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerapan unsur-unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Unsur-unsur SPIP antara lain:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi; dan
5. Pemantauan pengendalian intern.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, melaksanakan penilaian atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun ruang lingkup penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi antara lain:

1. Mekanisme penilaian, terdiri dari:
 - a. Penilaian mandiri oleh manajemen Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;

- b. Penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - c. Evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri oleh manajemen Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dan penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
2. Fokus penilaian, pada tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi, mencakup unsur-unsur berikut:
 - a. SPIP;
 - b. Manajemen Risiko Indeks (MRI);
 - c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK); dan
 - d. Kapabilitas APIP, akan dilakukan penilaian tersendiri.
 3. Komponen penilaian, terdiri dari:
 - a. Penetapan tujuan, untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis.
 - b. Struktur dan proses, untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP.
 - c. Pencapaian tujuan, untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
 4. Periode yang dinilai dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan, berdasarkan:
 - a. Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
 - b. Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
 - c. Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil penilaian cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau,

penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Dumai telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP “Level 3 (Terdefinisi)” dengan nilai 3,356 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,240 serta skor IEPK sebesar 2,874. Realisasi capaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Kota Dumai Tahun 2023 ini lebih tinggi dari target nilai maturitas yang direncanakan pada dokumen Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu 3,2. Artinya realisasi indikator ini di tahun 2023 memenuhi target yang direncanakan dengan tingkat capaian sebesar 105%.

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan untuk “Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP” yaitu “3,225”. Penilaian yang dilakukan oleh BPKP terhadap indikator ini dilakukan satu kali dalam setahun, dan penyampaian hasil penilaian biasanya dilakukan di awal tahun berikutnya, oleh karena itu sampai dengan TW II tahun 2024 ini, realisasi yang digunakan terhadap indikator ini adalah realisasi tahun 2023 yaitu “3,356”.

b) Skor Kapabilitas APIP.

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat kapabilitas APIP. Penilaian Kapabilitas APIP dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Ruang lingkup penilaian kapabilitas APIP meliputi:

1. Mekanisme Penilaian, meliputi:
 - a. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - b. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah oleh BPKP; dan

- c. Monitoring tindak lanjut dilaksanakan oleh BPKP dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
2. Komponen Penilaian, terdiri atas:
 - a. Dukungan pengawasan;
 - b. Aktivitas pengawasan; dan
 - c. Kualitas pengawasan.
3. Aspek Penilaian, terdiri atas:
 - a. Kebijakan;
 - b. Implementasi; dan
 - c. Hasil.
4. Periode Penilaian:
 - a. Penilaian Mandiri dilakukan secara periodik setiap tahun pada triwulan I sampai dengan triwulan II tahun berjalan.
 - b. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.

Berdasarkan hasil QA (Quality Assurance) atas penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Dumai oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Dumai telah berada pada “Level 3 atau kategori Delivered” dengan skor sebesar 3,310 dari skor maksimal sebesar 5,00. Realisasi capaian skor kapabilitas APIP Kota Dumai Tahun 2023 ini sesuai dengan target skor kapabilitas APIP yang direncanakan pada dokumen Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu 3,31. Artinya realisasi indikator ini di tahun 2023 memenuhi target yang direncanakan dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan untuk “Skor Kapabilitas APIP” yaitu “3,35”. Penilaian yang dilakukan oleh BPKP terhadap indikator ini dilakukan satu kali dalam setahun, dan penyampaian hasil penilaian biasanya dilakukan di awal tahun berikutnya, oleh karena itu sampai dengan TW II tahun 2024 ini, realisasi yang digunakan terhadap indikator ini adalah realisasi tahun 2023 yaitu dengan skor “3,31”.

c) Rata-rata Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penyelenggaraan SAKIP pada OPD dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja OPD, yaitu unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja, meliputi:

- a. rencana strategis;
- b. perjanjian kinerja;
- c. pengukuran kinerja;
- d. pengelolaan data kinerja;
- e. pelaporan kinerja; dan
- f. reviu dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas implementasi SAKIP internal Tahun 2023 kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 700-08.01.I/INSP/2023, dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum pelaksanaan evaluasi AKIP bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Perangkat Daerah. Sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Instrumen yang digunakan dalam evaluasi adalah Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang menyajikan 4 (empat) komponen penilaian dengan masing-masing subkomponen yang dilengkapi dengan kriteria penilaian dengan bobot sebagai berikut:

- a. perencanaan kinerja, bobot 30;
- b. pengukuran kinerja, bobot 30;
- c. pelaporan kinerja, bobot 15; dan
- d. evaluasi akuntabilitas kinerja internal, bobot 25.

LKE disusun sebagai kertas kerja evaluator dalam melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta penyimpulan data dan informasi. Berdasarkan dokumen/informasi yang dikumpulkan, setiap kriteria yang dinilai pada LKE kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan “*Professional Judgements*” dari evaluator untuk menentukan bobotnya. Hasil pengisian LKE kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

Evaluasi atas implementasi SAKIP internal di lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 dibagi ke dalam 3 (tiga) kluster dengan Perangkat Daerah yang dievaluasi pada masing-masing kluster adalah sebagai berikut:

- 1) Kluster Utama: (1) Dinas Kesehatan; (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; (4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; (5) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; (6) Dinas Perikanan; (7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; (8) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; (9) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (10) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian; (11) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; (12) Satuan Polisi Pamong Praja; (13) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; (14) Inspektorat Daerah; dan (15) Dinas Perdagangan.
- 2) Kluster Pendukung: (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (3) Dinas Tenaga Kerja; (4) Dinas Lingkungan Hidup; (5) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (7) Dinas Perhubungan; dan (8) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- 3) Kluster Tambahan: (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; (2) Sekretariat DPRD; (3) Kecamatan Dumai Kota; (4) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; (5) Kecamatan Dumai Timur; (6) Sekretariat Daerah; (7) Kecamatan Dumai Barat; (8) Kecamatan Dumai Selatan; (9) Kecamatan Bukit Kapur; (10) Badan Pendapatan Daerah; (11) Kecamatan Sungai Sembilan; (12) Rumah Sakit Umum Daerah; (13) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan (14) Kecamatan Medang Kampai.

Target yang ditetapkan untuk indikator “Rata-rata Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah” tahun 2023 pada dokumen Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Kota Dumai adalah 72. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, rata-rata nilai implementasi SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebesar 66,81 dengan Predikat B. Berdasarkan data tersebut, maka realisasi indikator ini di tahun 2023 tidak memenuhi target yang direncanakan dengan tingkat capaian sebesar 93%.

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan untuk Rata-rata Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah” pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah “72” . Evaluasi atas implementasi SAKIP internal dilakukan oleh Tim Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai satu kali dalam setahun, dan penyampaian hasil penilaian biasanya dilakukan di akhir tahun, oleh karena itu sampai dengan TW II tahun 2024 ini, realisasi yang digunakan terhadap indikator ini adalah realisasi tahun 2023 yaitu “72”.

- d) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan BPK - RI.

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK – RI yang sudah ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi BPK – RI}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan BPK-RI” tahun 2023 pada dokumen Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Kota Dumai yaitu sebesar 86%. Sampai dengan tahun 2023, jumlah temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau adalah sebanyak 502 temuan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 1.205 rekomendasi. Dari total 1.205 rekomendasi tersebut, yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi adalah sebanyak 1.004, sebanyak 153 sudah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi, sedangkan sisanya sebanyak 36 rekomendasi belum ditindaklanjuti dan 12 temuan tidak dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan data-data tersebut, maka tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau tahun 2023 adalah sebesar 83%, artinya realisasi indikator ini di tahun 2023 belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 97%.

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan untuk “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan BPK - RI” pada Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah “86,3%”. Berdasarkan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2023

dengan tingkat capaian 97%, kemungkinan target yang ditetapkan pada tahun 2023 juga tidak terealisasi.

- e) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan APIP.

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi APIP yang sudah ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi APIP}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk indikator “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan APIP” tahun 2023 pada dokumen Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai yaitu sebesar 87%. Sampai dengan tahun 2023, jumlah temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kota Dumai adalah sebanyak 3.394 temuan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 5.827 rekomendasi. Dari total 5.827 rekomendasi tersebut, yang sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi adalah sebanyak 4.978, sebanyak 227 sudah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi, sedangkan sisanya 622 rekomendasi belum ditindaklanjuti. Berdasarkan data-data tersebut, maka tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP tahun 2023 adalah sebesar 85%, artinya realisasi indikator ini di tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat capaian 98%.

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan untuk “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan APIP” pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah “87,3%” . Berdasarkan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2023 dengan tingkat capaian 98%, kemungkinan besar target yang ditetapkan pada tahun 2024 juga tidak terealisasi.

2.3. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi diidentifikasi melalui permasalahan, tantangan dan peluang pelayanan perangkat daerah. Identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat daerah digunakan untuk menentukan program Perangkat Daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam

melakukan identifikasi sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.

Adapun permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan unsur pengawasan diantaranya:

1. Belum memadainya sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
2. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
4. Belum optimalnya penegakan integritas;
5. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP;
8. Kurangnya koordinasi dan komunikasi intensif dengan semua auditan akan arti pentingnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesegera mungkin;
9. Belum optimalnya pengawasan dan pendampingan terhadap program prioritas/strategis;
10. Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan; dan
11. Terbatasnya anggaran untuk pendidikan profesional berkelanjutan.

Inspektorat Daerah Kota Dumai merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Daerah Kota Dumai menyelenggarakan 6 (enam) fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Dumai mendukung pencapaian Misi keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 “*Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik*” . Dari hasil identifikasi permasalahan seperti yang tersaji diatas, terdapat beberapa peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Dumai sebagai berikut:

1. Peluang:
 - a. Integritas dan motivasi kerja aparatur yang cukup tinggi;
 - b. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan di daerah;
 - c. Inspektorat Daerah Kota Dumai memiliki auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dengan disiplin ilmu yang beragam, sehingga bisa saling mensinergikan sudut pandang terhadap permasalahan audit;
 - d. Fungsional auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) didukung oleh standar audit dan kode etik serta peraturan/kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan pengawasan;
 - e. Fungsional auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) didukung oleh pendidikan teknis dan non teknis untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan;
 - f. Adanya dukungan atau komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*);
 - g. Peran APIP semakin dibutuhkan sebagai mitra dalam meningkatkan kinerja, khususnya sebagai kontrol dan evaluasi terhadap segala proses kerja yang dilakukan;
 - h. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aplikasi, *tools* dan metode pengawasan membantu pengembangan serta

pemutakhiran program pengawasan sehingga dapat meminimalisir segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran; dan

- i. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2. Tantangan

- a. Alokasi sumber daya audit yang terbatas dalam menentukan objek/entitas yang akan dievaluasi dengan cara yang paling efektif;
- b. Belum optimalnya perangkat Teknologi Informasi serta sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
- c. Perlunya penguatan integritas, independensi, dan profesionalitas APIP;
- d. Perlunya peningkatan kompetensi dan pemenuhan jumlah SDM APIP;
- e. Optimalisasi pengawasan terhadap pengaduan masyarakat;
- f. Masih rendahnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah;
- g. Aktivitas pengawasan oleh APIP melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* diarahkan untuk perbaikan GRC termasuk manage risiko dan memastikan pengendalian telah ada, dilaksanakan, dan efektif.
- h. Praktik pengawasan harus sesuai standar profesi;
- i. Berkembangnya paradigma pengawasan, yaitu APIP sebagai *strategic partner, quality assurance, and consulting*.

Berdasarkan peluang dan tantangan yang dihadapi, maka isu strategis pelayanan Inspektorat Daerah Kota Dumai adalah “**Peningkatan pelayanan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui penguatan peran dan kapasitas APIP**” agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB III

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN**

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil evaluasi program/kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, maka pada Tabel 3.1 berikut terlampir perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024.

Bab III - Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan

Kode	Usana/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja				Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Sebelum		Setelah		Sebelum	Pergeseran Ke-7	Kebutuhan (Kebutuhan - Pergeseran Ke-7)	Selisih (Kebutuhan - Pergeseran Ke-7)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah								
6 01 03 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Dumai	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	-	-	0 Dokumen	-			
6 01 03 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kota Dumai	1 Laporan	1 Laporan	185.527.200	264.587.200	99.060.000	350.000.000	DTU - DAU	1 Laporan	350.000.000			
6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya		235 Orang	62 Orang	187.190.524	2.266.642.042	2.079.451.518	600.000.000	DTU - DAU	266 Orang	600.000.000			
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kota Dumai	35 Orang	62 Orang	187.190.524	2.266.642.042	2.079.451.518	500.000.000	DTU - DAU	66 Orang	500.000.000			
6 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Dumai	200 Orang	0 Orang	100.000.000	-	-	100.000.000	DTU - DAU	200 Orang	100.000.000			
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum Perangkat Daerah		1 Laporan	1 Laporan	644.286.700	920.908.375	276.621.675	1.823.000.000		1 Laporan	1.823.000.000			
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Dumai	2 paket	2 paket	13.901.500	14.895.900	994.400	75.000.000	DTU - DAU	1 paket	75.000.000			
6 01 01 2.06 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Dumai	1 paket	1 paket	118.247.600	148.428.725	30.181.125	388.000.000	DTU - DAU	3 paket	388.000.000			
6 01 01 2.06 03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Dumai	2 paket	2 paket	22.807.100	35.292.500	12.485.400	180.000.000	DTU - DAU	2 paket	180.000.000			
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Dumai	2 paket	2 paket	97.592.000	97.592.000	-	200.000.000	DTU - DAU	4 paket	200.000.000			
6 01 01 2.06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Dumai	2 paket	2 paket	89.994.500	77.938.250	12.056.250	200.000.000	DTU - DAU	2 paket	200.000.000			
6 01 01 2.06 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kota Dumai	1 Dokumen	1 Dokumen	4.988.000	5.100.000	112.000	50.000.000	DTU - DAU	1 Dokumen	50.000.000			
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Dumai	40 Laporan	45 Laporan	296.756.000	436.961.000	140.205.000	750.000.000	DTU - DAU	55 Laporan	750.000.000			
6 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Dumai	0 Dokumen	1 Dokumen	-	104.700.000	104.700.000	-	DTU - DAU	0 Dokumen	-			
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan penguasaan		61 unit	51 unit	310.708.980	1.383.432.372	1.072.723.392	1.075.208.000		86 unit	1.075.208.000			
6 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Kota Dumai	1 unit	1 unit	125.208.000	35.112.000	35.112.000	125.208.000	DTU - DAU	1 unit	125.208.000			
6 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kota Dumai	0 unit	0 unit	-	-	-	-	DTU - DAU	0 unit	-			
6 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kota Dumai	28 unit	28 unit	200.000.000	461.884.984	337.611.392	300.000.000	DTU - DAU	45 unit	300.000.000			
6 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Dumai	30 unit	20 unit	500.000.000	600.000.000	600.000.000	650.000.000	DTU - DAU	40 unit	650.000.000			
6 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kota Dumai	1 unit	1 unit	400.000.000	186.425.388	186.425.388	-	DTU - DAU	0 unit	-			
6 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kota Dumai	1 unit	0 unit	150.000.000	-	-	-	DTU - DAU	0 unit	-			

Kode	Usaha/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Tahun 2024				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Selisih (Kebutuhan - Pengeseran Ke-7)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah						
6 01 01 2 07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kota Dumai	1 unit		100.000.000	100.000.000						
6 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan ususan pengawasan		3 Laporan		452.300.400	2.000.000				3 Laporan	548.000.000	
6 01 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Dumai	1 Laporan		24.000.000	2.000.000		DTU - DAU		1 Laporan	1.000.000	
6 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Dumai	1 Laporan		428.300.400	-		DTU - DAU		1 Laporan	100.000.000	
6 01 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Dumai	1 Laporan		428.300.400	-		DTU - DAU		1 Laporan	447.000.000	
6 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik perangkat daerah penunjang ususan pengawatan yang dipelihara		59 unit		230.778.000	237.462.000				133 unit	1.130.992.196	
6 01 01 2 09 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan/perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Dumai	1 unit		19.000.000	-		DTU - DAU		1 unit	150.000.000	
6 01 01 2 09 02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Dumai	7 unit		162.240.000	-		DTU - DAU		11 unit	401.600.000	
6 01 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Dumai	50 unit		60.000.000	38.462.000		DTU - DAU		120 unit	229.992.196	
6 01 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Dumai	1 unit		150.000.000	199.000.000		DTU - DAU		1 unit	350.000.000	
6 01 02	PROGRAM PENYELenggaraAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan		100%		2.938.351.512	844.527.600				100%	4.252.110.842	
6 01 02 2 01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan internal		108 Laporan		2.220.000.000	520.527.600				153 Laporan	3.052.110.842	
6 01 02 2 01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	Kota Dumai	5 Laporan		99.900.000	-		DTU - DBH		20 Laporan	727.110.842	
6 01 02 2 01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	Kota Dumai	60 Laporan		608.700.000	160.950.000		DTU - DBH		60 Laporan	1.250.000.000	
6 01 02 2 01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Kota Dumai	40 Laporan		298.859.900	312.000.000		DTU - DBH		70 Laporan	405.000.000	
6 01 02 2 01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	Kota Dumai	1 Laporan		39.835.500	-		DTU - DBH		1 Laporan	120.000.000	
6 01 02 2 01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APP	Kota Dumai	2 dokumen		274.476.400	78.327.600		DTU - DBH		2 dokumen	550.000.000	
6 01 02 2 02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu		19 laporan		144.000.000	324.000.000				36 laporan	1.200.000.000	
6 01 02 2 02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	Kota Dumai	1 laporan		29.080.000	93.000.000		DTU - DBH		1 laporan	550.000.000	

Bab III – Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja				Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Sebelum		Sesudah		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Pergeseran Ke-7	Kebutuhan	Selesih (Kebutuhan - Pergeseran Ke-7)	Sumber Dana			
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan bujukan tertentu	Kota Dumai	18 laporan	18 laporan	338.351.512	114.920.000	345.920.000	231.000.000	DTU - DBH	35 laporan	650.000.000		
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistansi		100%	100%	1.250.000.000	1.034.374.800	2.947.762.533	1.913.386.733		100%	2.900.000.000		
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang disusun		2 rekomendasi	2 rekomendasi	350.000.000	62.569.100	662.000.000	599.430.900		2 rekomendasi	650.000.000		
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Kota Dumai	1 rekomendasi	1 rekomendasi	200.000.000	62.569.100	100.000.000	37.430.900	DTU - DBH	1 rekomendasi	350.000.000		
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan yang disusun	Kota Dumai	1 rekomendasi	1 rekomendasi	150.000.000	-	562.000.000	562.000.000	DTU - DBH	1 rekomendasi	300.000.000		
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistansi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistansi		22 perangkat daerah	22 perangkat daerah	900.000.000	971.806.700	2.285.762.533	1.313.955.833		79 perangkat daerah	2.250.000.000		
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistansi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistansi urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	100.000.000	200.000.000	300.000.000	100.000.000	DTU - DBH	5 perangkat daerah	550.000.000		
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistansi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistansi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Dumai	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	250.000.000	249.962.000	349.190.000	99.208.000	DTU - DBH	37 perangkat daerah	500.000.000		
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Dumai	3 kegiatan	3 kegiatan	300.000.000	271.824.700	944.202.308	672.377.608	DTU - DBH	3 kegiatan	600.000.000		
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistansi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistansi dan verifikasi Penegakan Integritas	Kota Dumai	2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	250.000.000	250.000.000	692.370.225	442.370.225	DTU - DBH	37 perangkat daerah	600.000.000		



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB IV
BAB IV

PENUTUP
PENUTUP

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024 merupakan perubahan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2024 yang dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun berjalan pelaksanaannya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perumusan perubahan Renja Inspektorat Daerah ini disusun berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Tata cara penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tepatnya Bab VII “Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah” Bagian Keenam “Tata Cara Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah”. Selanjutnya setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota, perubahan dokumen rencana tahunan ini dijadikan acuan oleh Inspektur Daerah Kota Dumai dalam menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun 2024.



PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAMPPIRAN
LAMPPIRAN

INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		INSPEKTORAT DAERAH							24.298.360.182,00	14.569.856.440,00	23.258.886.498,00	-1.039.473.684,00							25.698.201.038,00	
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							24.298.360.182,00	14.569.856.440,00	23.258.886.498,00	-1.039.473.684,00							25.698.201.038,00	
6.01		INSPEKTORAT DAERAH							24.298.360.182,00	14.569.856.440,00	23.258.886.498,00	-1.039.473.684,00							25.698.201.038,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan				100 %	100 %	20.110.008.670,00	12.169.708.840,00	18.000.824.565,00	-1.563.918.474,00							18.546.090.196,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				8 Dokumen	6 Dokumen	460.000.000,00	109.060.596,00	190.260.596,00	-269.739.404,00					ASN INSPEKTORAT		550.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	0,00	30.200.000,00	-4.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	109.060.596,00	140.060.596,00	-109.939.404,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah				2 Laporan	1 Laporan	15.125.040.670,00	10.069.856.440,00	12.052.453.580,00	-3.072.587.090,00					ASN INSPEKTORAT		12.468.890.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/b ulan	62 Orang/b ulan	15.055.040.670,00	10.069.856.440,00	12.052.453.580,00	-3.002.587.090,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			12.318.890.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	0 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	165.527.200,00	264.587.200,00	-35.412.800,00					ASN INSPEKTORAT		350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	165.527.200,00	264.587.200,00	-35.412.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya				235 Orang	62 Orang	600.000.000,00	187.190.524,00	2.266.642.042,00	1.666.642.042,00					ASN INSPEKTORAT		600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	62 Orang	500.000.000,00	187.190.524,00	2.266.642.042,00	1.766.642.042,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.338.000.000,00	644.286.700,00	920.908.375,00	-417.091.625,00					ASN INSPEKTORAT		1.823.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	13.901.500,00	14.895.900,00	-35.104.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			75.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	118.247.600,00	148.428.725,00	-101.571.275,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			368.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	22.807.100,00	35.292.500,00	-64.707.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			180.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	150.000.000,00	97.592.000,00	97.592.000,00	-52.408.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	180.000.000,00	89.994.500,00	77.938.250,00	-102.061.750,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	4.988.000,00	5.100.000,00	-2.900.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	45 Laporan	600.000.000,00	296.756.000,00	436.961.000,00	-163.039.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			750.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-				1 Dokumen	0,00	0,00	104.700.000,00	104.700.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Pengawasan				48 Unit	51 Unit	1.375.208.000,00	310.708.980,00	1.383.432.372,00	8.224.372,00					ASN INSPEKTORAT		1.075.208.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	125.208.000,00	0,00	35.112.000,00	-90.096.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			125.208.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0005			Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	28 Unit	200.000.000,00	124.283.592,00	461.894.984,00	261.894.984,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	20 Unit	500.000.000,00	0,00	600.000.000,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			650.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0009			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	186.425.388,00	186.425.388,00	-213.574.612,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0011			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan pengawasan				2 Laporan	3 Laporan	418.600.000,00	452.300.400,00	454.300.400,00	35.700.400,00					ASN INSPEKTORAT		548.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
6.01.01.2.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-16.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	378.600.000,00	428.300.400,00	428.300.400,00	49.700.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			447.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
			Jumlah Barang Milik Perangkat Daerah yang Dipelihara				59 Unit	59 Unit	493.160.000,00	230.778.000,00	468.240.000,00	-24.920.000,00					ASN INSPEKTORAT		1.130.992.196,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	33.560.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	-14.560.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya				7 Unit	7 Unit	249.600.000,00	162.240.000,00	162.240.000,00	-87.360.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			401.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	60.000.000,00	49.538.000,00	88.000.000,00	28.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			229.392.196,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	199.000.000,00	49.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan				100 %	100 %	2.938.351.512,00	1.465.771.800,00	2.310.299.400,00	1.313.759.330,00							4.252.110.842,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal				108 Laporan	121 Laporan	2.220.000.000,00	1.321.771.800,00	1.842.299.400,00	-377.700.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		3.052.110.842,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				5 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	99.900.000,00	69.150.000,00	-30.850.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			727.110.842,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				60 Laporan	70 Laporan	1.250.000.000,00	608.700.000,00	769.650.000,00	-480.350.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			1.250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				40 Laporan	45 Laporan	400.000.000,00	298.859.900,00	610.859.900,00	210.859.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			405.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	39.835.500,00	39.835.500,00	-10.164.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			120.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	2 Dokumen	420.000.000,00	274.476.400,00	352.804.000,00	-67.196.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			550.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				19 Laporan	19 Laporan	718.351.512,00	144.000.000,00	468.000.000,00	-250.351.512,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		1.200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	380.000.000,00	29.080.000,00	122.080.000,00	-257.920.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			550.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				18 Laporan	18 Laporan	338.351.512,00	114.920.000,00	345.920.000,00	7.568.488,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			650.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi				100 %	100 %	1.250.000.000,00	934.375.800,00	2.947.762.533,00	1.650.000.000,00							2.900.000.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang disusun				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	350.000.000,00	62.569.100,00	662.000.000,00	312.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		650.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	200.000.000,00	62.569.100,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	150.000.000,00	0,00	562.000.000,00	412.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi				22 Perangkat Daerah	22 Perangkat Daerah	900.000.000,00	871.806.700,00	2.285.762.533,00	1.385.762.533,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah		2.250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			550.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	250.000.000,00	249.982.000,00	349.190.000,00	99.190.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	3 Kegiatan	300.000.000,00	271.824.700,00	944.202.308,00	644.202.308,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	692.370.225,00	442.370.225,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	05. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PE NYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH			600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
J U M L A H									24.298.360.182,00	14.569.856.440,00	23.258.886.498,00	-1.039.473.684,00							25.698.201.038,00	